

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan cepat termasuk di Indonesia sendiri. Dengan adanya teknologi pada dasarnya adalah untuk mempermudah manusia dalam menjalankan sesuatu hal. Teknologi informasi ini sudah banyak digunakan untuk memproses, mengolah data, menganalisis data untuk menghasilkan data atau informasi yang relevan, cepat, jelas, dan akurat. Teknologi informasi sudah banyak digunakan di lembaga pemerintahan atau pun perusahaan swasta dan institusi lainnya. Perkembangan teknologi informasi telah membuka babak baru di lingkungan masyarakat dan instansi. Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK), yang memberdayakan pengguna dengan analisis data yang mendalam dan rekomendasi keputusan cerdas. Dengan integrasi SPK, instansi dan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan efisien, membawa manfaat besar dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan strategis. (Yana Siregar et al., 2020)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970 oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Systems (Daihani, 2001). Selanjutnya, sejumlah perusahaan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan membangun SPK. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan

yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur.(Maria & Junirianto, 2021).

Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang membantu user dalam menentukan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang dapat membantu user(Maulana & Meidelfi, 2020). Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam membangun sistem pendukung keputusan diantaranya ada metode Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (Topsis), Metode Weighted Product (WP) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Topsis adalah metode pendukung keputusan multi kriteria dengan dasar alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif(Wira Trise Putra et al., 2020). Konsep dasar metode wp itu menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan dan metode ini cocok digunakan untuk pengambilan keputusan sederhana. Sementara AHP metode yang mengambil keputusan dengan cara mengadu satu persatu alternatif pilihan yang ada.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) telah terbukti efektif dalam menangani berbagai masalah. Melalui penerapan metode ini, keputusan dapat diambil berdasarkan perhitungan (Alawiah & Putri, 2021)matematis yang obyektif dan menghasilkan hasil yang lebih akurat, maka diperlukan sebuah sistem SPK. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat penelitian tentang penentuan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan

menggunakan metode TOPSIS, Karena TOPSIS mampu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan mampu menyelesaikan masalah keputusan dengan praktis yaitu mengambil prinsip bahwa nilai yang dipilih adalah yang mempunyai nilai preferensi yang tinggi.(Habibah & Rosyda, 2022)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam mendukung kehidupan sehari-hari mereka. Di Kabupaten Pasaman, seperti di banyak daerah lainnya, penyaluran BLT seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan. Salah satunya adalah penentuan penerima BLT yang efisien dan adil. Saat ini, proses penentuan penerima BLT masih dilakukan secara manual, yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan data, keberpihakan, dan keputusan yang kurang objektif.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa dalam menentukan penerima BLT, terdapat berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan. Kriteria-kriteria ini melibatkan berbagai aspek, seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, lansia, pekerja harian, dan pendidikan. Menentukan penerima BLT dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara manual tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan peluang kesalahan.(Herdiana et al., 2021)

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan solusi yang efisien, cepat, dan akurat dalam menentukan penerima BLT. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, penggunaan sistem berbasis web dalam implementasi SPK juga sangat relevan. Sistem berbasis web memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas bagi pengguna,

memudahkan pengelolaan data, serta memastikan keamanan dan integritas data. Oleh karena itu, penggunaan metode TOPSIS berbasis web dalam penentuan penerima BLT di Kabupaten Pasaman dianggap sebagai solusi yang tepat dan efisien.

Pada penelitian ini, diharapkan dapat diimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan Metode TOPSIS untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pasaman. Dengan demikian, proses penentuan penerima BLT diharapkan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan adil, sehingga manfaat dari program BLT dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pasaman. (Ilmiah et al., n.d.). Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui pengembangan sebuah sistem pendukung keputusan. Metode TOPSIS akan digunakan untuk mengambil keputusan yang optimal berdasarkan preferensi kesamaan dengan solusi ideal. Penelitian ini akan difokuskan pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penentuan penerima BLT serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENGGUNAKAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dinas sosial kabupaten pasaman melakukan proses distribusi bantuan langsung tunai (BLT) pada target yang tepat?
2. Bagaimana menciptakan suatu sistem yang mampu membantu proses dinas sosial kabupaten pasaman dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT)?
3. Bagaimana kriteria dalam sistem pendukung keputusan mampu menghasilkan keputusan yang baik dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT)?

## **1.3 Hipotesa**

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat mempermudah dinas sosial kabupaten pasaman dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) pada target yang tepat.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mempermudah dinas sosial kabupaten pasaman dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak salah sasaran.
3. Diharapkan kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS, seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, lansia, pekerja harian, dan Pendidikan, akan

memberikan kontribusi yang signifikan untuk menentukan keputusan yang baik dalam mendistribusikan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu, peneliti akan membuat sistem yang dapat mempermudah dinas sosial kabupaten pasaman dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada Masyarakat yang membutuhkan, sehingga nantinya bantuan langsung tunai (BLT) tersebut tepat sasaran ke yang membutuhkan. sistem yang akan dibuat nantinya akan berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP serta database MySQL dengan menggunakan metode WASPAS.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang relevan dan penting yang akan digunakan dalam penilaian untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pasaman, seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, dan kondisi kesehatan.
2. Merancang dan mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode TOPSIS, yang dapat memproses data kriteria penerima BLT secara efisien dan akurat.
3. Menggunakan Metode TOPSIS dalam mengolah data dan menghasilkan ranking penerima BLT berdasarkan kriteria dan bobot yang telah

ditentukan. Implementasi metode ini harus menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Sistem SPK akan meningkatkan efisiensi dalam proses penentuan penerima BLT dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, penggunaan Metode TOPSIS yang akurat akan menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan adil.
2. Dengan menggunakan sistem berbasis web, informasi terkait proses penentuan penerima BLT akan lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini akan menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam program bantuan sosial, meminimalkan potensi ketidakjelasan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
3. Sistem ini akan memungkinkan penyaluran BLT berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara obyektif, tanpa adanya keberpihakan atau diskriminasi. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat.
4. Dengan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, diharapkan program BLT ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat penerima, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka.

## 1.7 Gambaran umum Objek Penelitian

### 1.7.1 Sekilas Tentang Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman



**Gambar 1.1 Dinas Sosial Kabupaten Pasaman**

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman merupakan lembaga yang memegang peranan sentral dalam menyelenggarakan berbagai program sosial di wilayah ini. Fokus utamanya adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, termasuk anak-anak yatim piatu, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan tekad untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, Dinas Sosial ini mengorganisir program-program bantuan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan kesehatan guna memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang layak ke layanan sosial yang diperlukan.

Lewat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman berupaya menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, adil, dan berkeadilan. Mereka tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memfokuskan upaya pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan, menciptakan jaringan sosial yang kuat, dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak sosial. Dengan prinsip kesetaraan dan

keadilan sebagai pedoman, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman terus berkomitmen dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada warganya yang membutuhkan, mendorong pertumbuhan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Kabupaten Pasaman.

### **1.7.2 Visi & Misi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman**

#### **1. Visi**

Terwujudnya kualitas pelayanan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mandiri dan produktif.

#### **2. Misi**

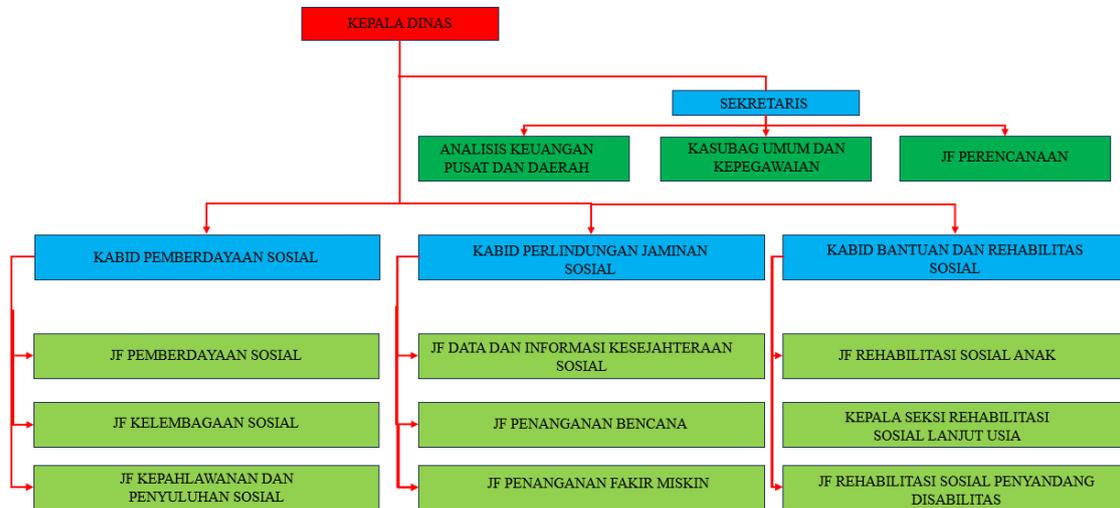
Misi Dinas Sosia Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta pemberdayaan Lembaga dan organisasi sosial (Orsos).
2. Memfasilitasi kemandirian panti asuhan.
3. meningkatkan penanganan penanggulangan korban bencana.
4. Memberdayakan Lembaga dan organisasi sosial.
5. Melestarikan nilai kepahlawanan dan kesejahteraan sosial.

### **1.7.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman**

Dengan adanya struktur organisasi diharapkan akan dapat diketahui dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN



Sumber : Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Pasaman

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten  
Pasaman**

### 1.7.4 Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah uraian pekerjaan pada Dinas Pertanian Pemerintahan Kabupaten Pasaman

1. Kepala dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) Kepala dinas sosial bertanggung jawab untuk merencanakan program-program dan kebijakan-kebijakan dinas sosial, termasuk program bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
  - b) Kepala dinas sosial mengelola anggaran dinas sosial dengan memastikan dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung program-program sosial yang telah

direncanakan.

c) Kepala dinas sosial juga memiliki tugas untuk membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan dukungan lainnya agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

d) Melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program sosial yang ada, hak-hak mereka, dan cara mengakses bantuan sosial.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menangani surat-menyurat, pengarsipan, dan penyusunan dokumen-dokumen administratif.

b) Mengelola jadwal pertemuan, rapat, dan acara-acara dinas sosial.

c) Menangani pertanyaan dan keluhan masyarakat yang masuk melalui telepon, surat, atau email.

d) Berkoordinasi dengan berbagai departemen dan unit internal dalam dinas sosial untuk memastikan informasi yang lancar dan efisien.

e) membantu dalam pengelolaan anggaran kecil atau administrasi keuangan yang melibatkan pembelian-pembelian kecil, pembayaran tagihan, dan pencatatan pengeluaran.

3. Analisis keuangan pusat dan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menyusun rencana anggaran untuk program-program dinas sosial berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

- b) Menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk dinas sosial, pusat, dan daerah, mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
  - c) Memastikan bahwa pengeluaran dinas sosial sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan mengidentifikasi potensi overspending atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana.
4. Kasubag umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) Mengelola proses rekrutmen dan seleksi calon pegawai baru.
  - b) Menyusun dan mengelola basis data pegawai, termasuk informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan data kepegawaian lainnya.
  - c) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pegawai dan mengorganisir pelatihan-pelatihan yang sesuai.
  - d) Mengelola sistem evaluasi kinerja pegawai.
5. Jf perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) Mengembangkan rencana strategis untuk program-program sosial dinas sosial berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
  - b) Menyusun rencana kerja tahunan dinas sosial berdasarkan rencana strategis dan arahan dari pimpinan dinas sosial.
  - c) Melakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

6. Kabid pemberdayaan social mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan program-program pemberdayaan sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, pelatihan usaha, dan program-program bantuan sosial lainnya.
- b) Mengorganisir pelatihan-pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang.
- c) Mengadakan pelatihan manajemen keuangan dan literasi keuangan untuk membantu masyarakat mengelola uang mereka dengan bijak.

7. Kabid perlindungan jaminan social mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan program perlindungan bagi korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, termasuk pelayanan konseling dan tempat perlindungan.
- b) Merancang program perlindungan khusus untuk lansia yang melibatkan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, dan pencegahan penipuan.
- c) Mengelola program-program bantuan sosial seperti tunjangan sosial, bantuan pendidikan, dan program bantuan lainnya kepada keluarga miskin dan rentan.

8. Kabid bantuan dan rehabilitas sosial mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut:

- a) Mengelola penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin, korban bencana, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, baik dalam bentuk uang tunai, sembako, pakaian, atau barang-barang kebutuhan lainnya.
- b) Mengorganisir program bantuan langsung seperti program makanan tambahan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan.
- c) Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan yayasan untuk meningkatkan akses dan kualitas bantuan dan rehabilitasi sosial.

9. Jf pemberdayaan social mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan rencana program pemberdayaan sosial berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- b) Mengorganisir pelatihan, lokakarya, dan seminar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang seperti kewirausahaan, pertanian, dan keterampilan lainnya.
- c) Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu sosial lainnya.

10. Jf kelembagaan social dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Merancang kebijakan organisasi yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program-program sosial.
- b) Melakukan evaluasi kinerja organisasi secara rutin dan merancang strategi perbaikan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.
- c) Mendukung implementasi perubahan organisasi dan memfasilitasi adaptasi staf terhadap perubahan-perubahan tersebut.

11. Jf kepahlawanan dan penyuluhan social mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan dan mengelola program-program kepahlawanan sosial yang menghargai dan mendukung peran para pahlawan lokal dan nasional dalam membangun masyarakat.
- b) Memberikan penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan kebersihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat dan makanan bergizi.
- c) Melakukan kampanye penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, termasuk hak-hak pendidikan, kesempatan belajar, dan manfaat pendidikan bagi perkembangan individu dan masyarakat.

12. Jf data dan informasi kesejahteraan social mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data sosial dan ekonomi masyarakat yang diperlukan untuk analisis kebijakan dan perencanaan program sosial.
- b) Merancang dan melaksanakan survei dan penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang masalah-masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Mengembangkan sistem informasi kesejahteraan sosial yang efisien untuk mengelola data, memantau program, dan melacak dampak kebijakan sosial.

13. Jf penanganan bencana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan rencana penanggulangan bencana yang melibatkan persiapan, respons, pemulihan, dan mitigasi risiko bencana.
- b) Melakukan pelatihan reguler dan simulasi untuk memastikan kesiapan staf dinas sosial dan relawan dalam menghadapi situasi bencana.
- c) Mengatur distribusi bantuan seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya kepada korban bencana.
- d) Menyediakan bantuan psikososial kepada korban bencana, termasuk konseling dan dukungan emosional.

14. Jf penanganan fakir miskin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi dan mendata individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi fakir miskin.
- b) Mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada fakir miskin, termasuk bantuan keuangan, sembako, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan.
- c) Memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin yang memiliki potensi untuk memulai usaha kecil atau mikro.

15. Jf rehabilitas social anak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian komprehensif terhadap anak-anak yang mengalami masalah sosial untuk menilai kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan mental, dan dukungan sosial.
- b) Memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak yang mengalami trauma atau tekanan emosional sebagai akibat dari pengalaman sosial yang sulit.
- c) Melakukan advokasi untuk hak-hak anak, termasuk hak pendidikan, keamanan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

16. Kepala seksi rehabilitas social lanjut usia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian terhadap kebutuhan fisik, mental, sosial,

dan ekonomi lanjut usia di komunitas.

- b) Merencanakan program rehabilitasi sosial yang melibatkan layanan kesehatan, pendampingan sosial, kegiatan rekreasi, pelatihan keterampilan, dan layanan psikososial bagi lanjut usia.
- c) Melakukan program perlindungan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, penipuan, dan eksploitasi lanjut usia di lingkungan mereka.

17. Jf rehabilitasi social penyandang disabilitas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian mendalam terhadap kebutuhan fisik, mental, sosial, dan ekonomi individu penyandang disabilitas.
- b) Mendukung akses penyandang disabilitas ke pendidikan inklusif dan mengkoordinasikan layanan pendidikan khusus jika diperlukan.
- c) Membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk rehabilitasi medis dan terapi fisik.